

EVALUASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA PROGRAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI SMK BALIKPAPAN

Firmansyah¹, Nurlaili², Widyatmike Gede Mulawarman³, Noor Rachmawaty⁴

¹SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan, ^{2,3,4}FKIP Universitas Mulawarman

¹firmansyah@smkti.net, ²nurlailisyamsul@yahoo.co.id,

³widyatmike@fkip.unmul.ac.id, ⁴noorrachmawaty@fkip.unmul.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of school-based management in Work-Based Learning (WBL) at Airlangga Health Vocational School Balikpapan. Employing a qualitative approach with the discrepancy evaluation model, it encompasses evaluations of design, installation, process, product, and cost analysis. Data were obtained from primary and secondary sources through interviews and documentation, subsequently analyzed through data collection, reduction, display, and conclusion drawing. The research findings indicate that the internship program planning has met the criteria, organizational aspects are in line with standards, and program execution has been successful. Monitoring and evaluation have also met the established standards. However, the assessment aspect requires improvement as it has not reached the desired standards. The main challenges in program implementation are financial issues and scheduling constraints. Based on the evaluation results, several program criteria need to be revised to enhance its quality.

Keywords: School Based Management, Internship, Discrepancy Evaluation Model

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada program PKL di SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi discrepancy, mencakup evaluasi desain, instalasi, proses, produk, dan analisis biaya. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui pengumpulan, reduksi, display, dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program PKL telah memenuhi kriteria, pengorganisasian sudah sesuai standar, dan pelaksanaan program telah terlaksana dengan baik. Monitoring dan evaluasi juga telah memenuhi kriteria standar yang ditetapkan. Namun, aspek penilaian perlu perbaikan karena belum mencapai standar yang diinginkan. Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah masalah pembiayaan dan penjadwalan waktu. Dari hasil evaluasi, beberapa kriteria program perlu direvisi untuk meningkatkan kualitasnya.

Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, PKL, Model Evaluasi Discrepancy.

A. Pendahuluan

Sekolah Menengah Kejuruan adalah satuan pendidikan kejuruan

pada jenjang pendidikan menengah yang bertujuan mempersiapkan peserta didik agar mampu bekerja,

baik secara mandiri (wirausaha) maupun untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensinya (Undang-Undang RI, 2003). Keberadaan SMK dinilai penting dalam menciptakan tenaga terampil yang siap bekerja di dunia industri. SMK merupakan strategi yang tepat untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bekerja di lingkungan profesional. Pendidikan ini membekali siswa dengan kemampuan bekerja yang sesuai dengan standar industri (Arar & Nasra, 2020). Kemampuan tersebut meliputi kemampuan teknis, kemampuan profesional, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja (Musundire & Dreyer, 2019). Oleh karena itu, pembelajaran di SMK dirancang berbasis produksi sekaligus pendekatan berbasis kerja.

Permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan kejuruan di Indonesia saat ini adalah menyangkut keterserapan lulusan dan peningkatan mutu sekolah (Amon & Bustami, 2021). Berdasar catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021 yang dikutip dari penelitian Hanim (2022) menyatakan bahwa lulusan SMK ternyata memiliki tingkat

pengangguran paling tinggi. Data menunjukkan jumlah pengangguran meningkat 0.6 juta dari 6.82 juta menjadi 6,88 juta yang disebabkan jumlah Angkatan kerja bertambah 136,18 juta menjadi 137,19 juta pada bulan Februari 2021. Tingkat pengangguran terbuka berjumlah 4.99%, untuk jenjang SMK sebesar 8.49%, jenjang SMA sebesar 6,67%, Diploma I/II/III sebesar 6,76%, Perguruan tinggi 5,73%, SMP sebesar 5,02% dan SD ke bawah sebesar 2,64%. Rendahnya keterserapan lulusan di dunia usaha dan dunia industri tersebut disebabkan belum terjadinya sinkronisasi kurikulum yang digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja (Amon & Harliansyah, 2022).

Berdasarkan fakta tersebut komitmen peningkatan kualitas pembelajaran berbasis dunia kerja yang bersinergi dengan kebutuhan riil di dunia kerja harus mendapat perhatian semua pihak terutama bagi penyelenggara pendidikan kejuruan itu sendiri. Kegiatan pembelajaran berbasis kerja yang relevan dengan kondisi riil di dunia kerja pada pendidikan jenjang SMK diakomodasi melalui program Praktik Kerja

Lapangan (PKL). Berdasarkan Permendiknas No. 50 Tahun 2020 metode pembelajaran PKL merupakan cara belajar melalui pengalaman untuk memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terjadi di dunia kerja yang relevan dengan kompetensi yang dipilih oleh peserta didik. Pada peraturan tersebut, pasal 3 butir (a) dijelaskan bahwa PKL merupakan program pembelajaran inti bagi peserta didik SMK. Program PKL memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk beradaptasi dengan suasana atau iklim lingkungan kerja yang sebenarnya sebagai pekerja mandiri, khususnya yang berkaitan dengan disiplin kerja serta memberikan masukan dan umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan pendidikan (Nurlaili, 2023). Oleh karenanya untuk meningkatkan kualitas kompetensi lulusan SMK yang sesuai kebutuhan dunia kerja maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas program Praktik Kerja Lapangan di SMK. Dalam praktiknya terdapat permasalahan umum yang terjadi dalam pelaksanaan PKL, yakni 1) siswa diberdayakan tidak relevan dengan penugasan PKL tidak sesuai dengan kompetensi

keahliannya, 2) Kurangnya kesempatan menggunakan alat 3) kegiatan monitoring dari pihak sekolah tidak maksimal, 4) lemahnya evaluasi (Nurlaili, 2023).

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan konsep yang menawarkan otonomi kepada sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan guna mengakomodasi kepentingan kualitas sekolah serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah atau secara operasional. MBS merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu kesatuan sistem (Mulawarman et al., 2022). Bentuk ideal manajemen berbasis sekolah mengacu pada pemberdayaan kepala sekolah dengan otonomi atas kontrol fisik, kurikulum, dan pengembangan profesional (Mahiroh & Abidin, 2023). Menurut Mulyasa (2019) penerapan manajemen berbasis sekolah terdiri dari: 1) Manajemen kurikulum dan program pembelajaran, 2) Manajemen pendidik, 3) Manajemen anak, 4) Manajemen keuangan, 5) Manajemen fasilitas pendidikan, dan 6) Manajemen sekolah. hubungan dengan

masyarakat dan layanan manajemen khusus.

Praktik kerja lapangan (PKL) sebagai inti pembelajaran di SMK merupakan program pembelajaran yang dapat dilaksanakan dengan manajemen berbasis sekolah. Menurut Mulyasa (2019) penerapan manajemen berbasis sekolah terdiri dari kurikulum dan manajemen pembelajaran. Manajemen berbasis sekolah pada pembelajaran PKL telah dilakukan di SMK Kesehatan Airlangga dengan merancang sendiri desain program pelaksanaannya. Dari observasi awal pada bulan April 2022 yang dilakukan di SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan melalui wawancara wakil kepala sekolah bidang Kesiswaan & Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab pelaksanaan PKL ditemukan bahwa : 1) kegiatan PKL di SMK Kesehatan Airlangga berjalan efektif dimana siswa peserta PKL diberdayakan hanya pada tugas-tugas yang sesuai dengan kompetensi keahliannya, 2) Rumah sakit sebagai tempat utama pelaksanaan PKL mensyaratkan pembiayaan pendidikan selama pelaksanaan PKL sesuai Pergub No.58 Tahun 2013 yang bertentangan dengan Permendikbud

No.50 tahun 2020 tentang PKL bahwa pihak dunia kerja memberikan insentif kepada peserta PKL sesuai kesanggupan perusahaan, 3) Sekolah selaku penyelenggara PKL menyiapkan pembiayaan khusus kepada mitra tempat pelaksanaan PKL, 4) Evaluasi PKL dilakukan dengan cara mengadakan sidang PKL yang merupakan kebijakan internal sekolah (MBS), namun kegiatan sidang PKL sebagai sarana evaluasi program belum mengevaluasi program PKL secara komprehensif, evaluasi hanya berfokus pada kelayakan mitra PKL sebagai tempat pelaksanaan PKL bagi siswa, 5) PKL yang dilaksanakan tidak mengacu pada pedoman pelaksanaan PKL yang terbaru yakni Permendikbud No. 50 Tahun 2020.

Mengacu pada kondisi tersebut maka peneliti terdorong untuk mengkaji dan meneliti masalah ini yang dirumuskan dengan judul penelitian evaluasi manajemen berbasis sekolah pada program praktik kerja lapangan di SMK Balikpapan. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi discrepancy untuk melihat kesenjangan antara kriteria dan implementasi manajemen berbasis sekolah pada program PKL dalam empat (4) tahap, yaitu tahap

Desain: 1) Perencanaan, tahap instalasi: 2) pengorganisasian, tahap proses: 3) pelaksanaan, 4) monitoring, tahap produk: 5) Evaluasi, 6) penilaian, dan tahap perbandingan analisis keuntungan biaya: , serta mengidentifikasi masalah dan solusinya. Penelitian terbaru tentang pelaksanaan program PKL dilakukan oleh Wardani (2022), dengan judul evaluasi program praktik kerja lapangan siswa SMK Dinamika Pembangunan Jakarta. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan praktik kerja industri yang mencakup: (1) evaluasi input: (a) kesiapan peserta didik, (b) kinerja guru mata pelajaran produktif, (c) kesiapan sarana dan prasarana; (2) evaluasi proses: (a) kinerja peserta didik, (b) kinerja pembimbing; (3) evaluasi produk: kesiapan kerja peserta didik; (4) mengidentifikasi kendala yang ada dalam pelaksanaan praktik kerja industri. Perbedaan penelitian Haryani dan Sunarto (2021) dengan penelitian ini adalah 1) pada objek sekolah yang diteliti dengan fokus kompetensi keahlian layanan kesehatan dengan kekhasan lingkungan praktik pada dunia kerja kesehatan, 2) indikator

evaluasi yang digunakan yakni berpedoman pada Permendikbud No. 50 Tahun 2020, 3) model evaluasi yang digunakan model evaluasi *discrepancy* dimana terdapat tahapan *cost benefit analysis* untuk melihat kelayakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara PKL.

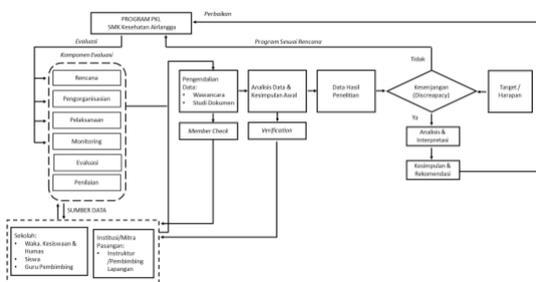
B. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMK Kesehatan Airlangga dan di perusahaan mitra yaitu Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan dan Klinik Piramida Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan model evaluasi *Discrepancy* (DEM). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga peneliti mengetahui ketercapaian program PKL berdasarkan desain pelaksanaan program PKL yang dibuat oleh sekolah. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara dan dokumentasi yang mendukung penelitian.

Model evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah *Discrepancy Evaluation Model* (DEM). Model evaluasi ini digunakan untuk melihat

kesenjangan antara standar atau kriteria dengan performa di lapangan sesuai dengan standar tahapan DEM yakni: 1) desain, 2) instalasi, 3) proses, 4) produk dan 5) analisis manfaat biaya. Kriteria evaluasi berdasarkan pada pedoman penyelenggaraan program PKL Kemdikbudristek tahun 2021 yaitu: 1) Perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pelaksanaan, 4) monitoring, 5) evaluasi dan 6) penilaian.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Alur penelitian meliputi penentuan lokus, Tahap-tahap penelitian mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Pada tahap ini, lokasi dan fokus penelitian ditentukan, instrumen penelitian dipersiapkan, data dikumpulkan, dan hasilnya dianalisis untuk disajikan dalam laporan penelitian.



Gambar 1. Alur Penelitian

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perencanaan Program PKL

Perencanaan program Praktik Kerja Lapangan SMK Kesehatan Airlangga meliputi enam kriteria yakni: 1) pemetaan kompetensi, 2) penetapan lokasi PKL, 3) penetapan waktu dan jangka waktu PKL, 4) pemetaan penempatan peserta didik, 5) penetapan pembimbing PKL, dan 6) pembekalan.

Kegiatan perencanaan PKL di SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan merupakan hasil dari evaluasi rapat program PKL sebelumnya, yang bertujuan untuk memeriksa kesenjangan antara target kegiatan dan realisasi guna mencapai tujuan program PKL yang ditetapkan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Usman (2021) yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan kunci untuk memastikan kelancaran kegiatan dengan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi kesenjangan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi program dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah sidang PKL, yang merupakan bagian integral untuk mengevaluasi persiapan, pelaksanaan, pencapaian kompetensi, dan pelayanan guru

pembimbing. Tahap kedua adalah rapat evaluasi khusus oleh tim manajemen sekolah sebagai tindak lanjut dari hasil sidang PKL untuk menyusun program PKL selanjutnya.

Pada tahap perencanaan, beberapa aspek menjadi fokus utama. Pertama, pemetaan kompetensi dilakukan berdasarkan target kurikulum yang disusun oleh kepala program keahlian. Hal ini disampaikan kepada mitra PKL baik secara lisan maupun tertulis melalui dokumen resmi. Kedua, penetapan lokasi PKL didasarkan pada rekomendasi hasil sidang PKL yang melibatkan siswa, guru pembimbing, dan manajemen sekolah. Ketiga, penetapan waktu dan jangka waktu PKL dibagi menjadi tiga gelombang dengan durasi empat bulan untuk setiap gelombang. Keempat, pemetaan penempatan peserta didik dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kebutuhan dunia kerja dan kompetensi peserta didik. Kelima, penetapan pembimbing PKL melibatkan guru pembimbing dari sekolah dan instruktur dari dunia kerja. Keenam, kegiatan pembekalan siswa dilakukan untuk mempersiapkan mereka secara mental dan kompetensi sebelum memulai PKL.

Secara keseluruhan, evaluasi perencanaan program PKL di SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan menunjukkan bahwa semua kriteria telah terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencapai tingkat capaian 100%. Ini menandakan bahwa perencanaan yang matang telah dilakukan untuk memastikan kesuksesan dan efektivitas pelaksanaan program PKL.

Pengorganisasian Program PKL

Pada tahap pengorganisasian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas dengan persetujuan kepala sekolah, menyusun struktur panitia pelaksana dengan melibatkan pihak yang secara jabatan struktural di organisasi relevan dengan tugas kepanitiaan program PKL.

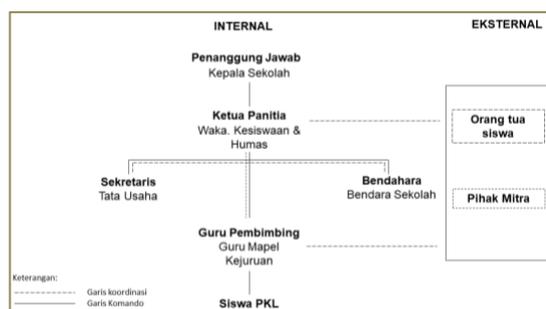
Struktur kepanitiaan PKL terdiri dari penanggung jawab, ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan guru pembimbing. Hal ini berdasarkan dokumen Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.5/207/Skep/XI/2021 tentang Pengangkatan Panitia, dan juga diungkapkan dalam hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah.

Struktur organisasi kepanitiaan PKL di jabat oleh struktur pejabat

sekolah yang terkait dengan zona pekerjaan reguler sehingga pekerjaan kepanitiaan juga melekat dengan tugas jabatan. Kebijakan ini berdampak pada efisiensi pekerjaan, seperti Ketua panitia adalah guru pejabat Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dan Hubungan masyarakat, sekretaris adalah staff ketatausahaan, bendahara panitia adalah tenaga kependidikan yang juga sebagai pejabat bendahara di sekolah, guru pembimbing adalah guru mata pelajaran keterampilan kejuruan sehingga dapat langsung mengawal kompetensi peserta didiknya di Lokasi PKL.

Secara internal organisasi ketua panitia mengomando seluruh organ panitia: Sekretaris, bendahara, dan guru pembimbing serta berkoordinasi dengan penanggung jawab. Secara eksternal ketua panitia dan guru pembimbing yang langsung berkoordinasi dengan pihak mitra PKL dan orang tua siswa. Kegiatan pengorganisasian di SMK Kesehatan Airlangga sesuai dengan pengertian pengorganisasian menurut Warman et al., (2022) adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai

dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Secara umum pengorganisasian program PKL di SMK Kesehatan Airlangga sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi PKL

SMK Kesehatan Airlangga

Pada kegiatan pengorganisasian seluruh kriteria yang meliputi struktur dan pembagian tugas, penugasan diimplementasikan sesuai dengan konsep yang sudah ditetapkan dengan tingkat pencapaian 100%.

Pelaksanaan Program PKL

Program PKL di SMK Kesehatan Airlangga memiliki fokus pada penempatan peserta, orientasi di tempat PKL, pelaksanaan praktik, dan pementoran oleh instruktur. Penempatan peserta didik dilakukan berdasarkan kompetensi keahlian yang telah ditetapkan oleh sekolah. Meskipun demikian, ada kasus di mana peserta belum memenuhi

kompetensi dan diarahkan untuk berperan sebagai asisten laboratorium sekolah.

Orientasi di tempat PKL bervariasi, dengan kegiatan terbaik terjadi di rumah sakit Bhayangkara. Ini melibatkan evaluasi melalui pre-test dan post-test serta pembekalan materi yang komprehensif.

Pelaksanaan PKL dilakukan dengan target kompetensi yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun tidak semua target kompetensi tercapai karena variasi kasus, SMK Kesehatan Airlangga menjadwalkan kegiatan PKL dengan dua *shift* untuk memaksimalkan pengalaman siswa.

Pementoran dilakukan dengan dua pola: bimbingan langsung oleh penanggung jawab PKL di mitra dan pola distribusi ke ruang layanan dengan bimbingan langsung oleh kepala ruangan. Evaluasi menunjukkan bahwa aspek penempatan masih kurang, namun orientasi, pelaksanaan praktik, dan pembimbingan sudah memenuhi kriteria, mencapai pencapaian sebesar 92%.

Pelaksanaan program PKL di SMK Kesehatan Airlangga menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam memastikan

pengalaman yang optimal bagi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan.

Evaluasi Pelaksanaan PKL

Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan suatu tindakan (Arar & Nasra, 2020). Kegiatan evaluasi program PKL SMK Kesehatan Airlangga dilakukan melalui mekanisme sidang PKL yang dilakukan setelah satu (1) gelombang PKL atau satu (1) semester dilaksanakan. Penentuan waktu tersebut sesuai dengan Permendikbud No. 50 bahwa kegiatan evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam satu periode PKL.

Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan menerima umpan balik dari penerima manfaat program menurut Arar & Nasra (Arar & Nasra, 2020) hanya ada satu tujuan keseluruhan kegiatan evaluasi program yaitu berkontribusi pada penyediaan layanan berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada konteks ini masyarakat yang dimaksud adalah siswa peserta PKL dan orang tua siswa. Evaluasi program berkontribusi terhadap kualitas layanan dengan memberikan umpan balik dari kegiatan dan hasil program

kepada mereka yang dapat membuat perubahan dalam program atau memutuskan layanan mana yang akan ditawarkan. Posavac menambahkan tanpa umpan balik, program pelayanan manusia (dan aktivitas apa pun) tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Proses tubuh kita memerlukan sistem umpan balik; sama halnya, umpan balik mengenai perilaku dalam organisasi juga penting bagi keberhasilan suatu organisasi (Guha, 2021).

Sidang PKL adalah kegiatan khas yang dimiliki oleh SMK Kesehatan Airlangga untuk mengevaluasi kegiatan PKL sebagai sarana umpan balik dari objek program dalam hal ini adalah peserta PKL untuk mendapatkan informasi terkait kendala dan kelemahan program. Kegiatan sidang ini merupakan produk manajemen berbasis sekolah (MBS). Menurut Mulyasa (Mulyasa, 2019) bahwa MBS merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu kesatuan sistem. Kepala sekolah bersama dengan tim manajemen sekolah menggagas kegiatan sidang PKL dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembekalan, kegiatan siswa selama di lokasi PKL,

ketercapaian kompetensi, dan kelayakan mitra PKL untuk pelaksanaan PKL selanjutnya. Kegiatan evaluasi dilakukan sebanyak satu kali dalam satu periode kegiatan. Sedangkan berdasarkan acuan pelaksanaan PKL pada Permendikbud No. 50 tahun 2020, kegiatan evaluasi meliputi perencanaan dan hasil pelaksanaan PKL. Evaluasi terhadap perencanaan PKL meliputi: pemetaan sesuai kompetensi peserta didik; penetapan lokasi PKL; penetapan jangka waktu PKL; pemetaan penempatan peserta didik sesuai kompetensi (dilakukan Pemetaan Kompetensi); penetapan instruktur dan guru pembimbing PKL; dan pembekalan peserta didik. Kegiatan evaluasi dilakukan satu kali diakhiri kegiatan.

Terdapat kesamaan substantif pada kegiatan evaluasi di SMK Kesehatan Airlangga dengan pedoman pelaksanaan PKL versi pemerintah (Permendikbud No. 50 Tahun 2020) yakni 1) evaluasi dilakukan 1(satu) kali pada akhir kegiatan PKL, 2) evaluasi meliputi pembekalan, pelaksanaan PKL, ketercapaian kompetensi siswa dan tempat pelaksanaan PKL. Namun kegiatan evaluasi melalui sidang PKL

di SMK Kesehatan Airlangga belum mengevaluasi guru pembimbing dan waktu pelaksanaan PKL. Pelaksanaan pada aspek evaluasi kegiatan PKL di SMK Kesehatan Airlangga memenuhi semua kriteria evaluasi yang ditetapkan dengan capaian persentase 100%.

Penilaian PKL

Pemberian nilai kepada peserta yang telah menyelesaikan kegiatan PKL di SMK Kesehatan Airlangga didasarkan pada empat aspek penilaian yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Namun berdasarkan dokumen buku Jurnal PKL SMK Kesehatan Airlangga halaman 4 terdapat cara penghitungan nilai akhir peserta PKL, yakni dengan mengakumulasi penilaian dari lokasi praktik sebesar 60% dan penilaian dari panitia 40%. Porsi nilai yang diambil dari lokasi praktik terdiri 1) aspek kehadiran di lokasi praktik 10%, 2) laporan observasi 10%, 3) nilai nilai dari guru pembimbing 20% berdasarkan laporan harian, mingguan terutama pada sikap dan perilaku peserta PKL. Sedangkan porsi pembagian nilai yang diberikan oleh panitia terdiri dari : 1) aspek kehadiran 10%, 2) sistematika laporan akhir 30%, 3) sertifikat 10%, dan 4) presentasi dan

pertanggungjawaban atau sidang PKL 50%.

Peneliti menemukan terjadi perbedaan di dalam implementasi penilaian bagi siswa pada program PKL di SMK Kesehatan Airlangga. Panitia menentukan nilai peserta PKL bukan berdasarkan indikator yang telah dibuat dan disosialisasikan pada buku panduan PKL melainkan membuat standar indikator yang berbeda sebagaimana yang tercantum pada sertifikat siswa yang dil keluarkan oleh panitia PKL. Adapun indikator penilaian yang digunakan meliputi sembilan (9) aspek penilaian yaitu: 1) ketercapaian kompetensi, 2) jurnal siswa, 3) kedisiplinan, 4) kerajinan dan presensi, 5) kerapian & kebersihan, 6) sikap dan perilaku, 7) kerjasama tim, 8) laporan, dan 9) sidang PKL. Keputusan mengubah indikator penilaian tersebut membuat proses penilaian yang lebih sederhana dan komprehensif yakni meliputi penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik siswa, sebagaimana Radhiah dan Sunarto (2021) bahwa objek penilaian pada kegiatan pembelajaran siswa meliputi aspek pengetahuan (kognitif), aspek keterampilan (psikomotorik) dan aspek sikap (afektif). Pada kegiatan penilaian hasil PKL siswa di SMK Kesehatan

Airlangga kesembilan indikator yang telah ditetapkan telah meliputi ketiga objek penilaian.

Tabel 1. Aspek dan Lingkup Penilaian PKL di SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan

| No. | Aspek | Lingkup Penilaian |
|-----|-------------------------|-----------------------------|
| 1. | Ketercapaian kompetensi | Keterampilan (Psikomotorik) |
| 2. | Jurnal siswa | Keterampilan (Psikomotorik) |
| 3. | Kedisiplinan | Sikap (Afektif) |
| 4. | Kerajinan dan presensi | Sikap (Afektif) |
| 5. | Kerapian & kebersihan, | Sikap (Afektif) |
| 6. | Perilaku | Sikap (Afektif) |
| 7. | Kerjasama tim | Sikap (Afektif) |
| 8. | Laporan | Pengetahuan (Kognitif) |
| 9. | Sidang PKL | Pengetahuan (Kognitif) |

Sehingga kriteria penilaian berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2020 telah terpenuhi, namun penilaian berdasarkan kriteria yang dibuat oleh SMK Kesehatan Airlangga yang menjadi tolak ukur keberhasilan evaluasi program PKL ini tidak terealisasi sepenuhnya karena kriteria cara penghitungan nilai PKL yang tidak sesuai dengan standar kriteria. Sehingga pencapaian evaluasi aspek penilaian pada program PKL di SMK Kesehatan Airlangga sebesar 67%.

Kendala PKL

Faktor yang menjadi kendala dalam Kegiatan PKL di SMK Kesehatan Airlangga pertama adalah pada pembiayaan. Pelaksanaan PKL

pada bidang kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit terdapat skema pembayaran tertentu sebagai biaya pendidikan. Hal tersebut menjadi ketentuan internal di rumah sakit dan tercantum pada nota kesepahaman yang didasarkan pada SK Gubernur Kalimantan Timur No. 58 tahun 2013 pihak sekolah dan mitra. Biaya lain yang menjadi tanggungan pihak penyelenggara adalah pembiayaan operasional seperti honor panitia dan guru pembimbing, Alat tulis Kantor, honor pemateri dari mitra pada kegiatan pembekalan yang masih mengandalkan kemampuan keuangan sekolah yang bersumber dari dana iuran PKL siswa, surat pembayaran pendidikan (SPP) siswa dan bantuan operasional sekolah (BOS). Pembayaran pelaksanaan PKL umumnya dibayar di muka sehingga pembiayaan di awal cukup besar dan menuntut pembayaran yang dibebankan pada siswa harus dilakukan di awal waktu. Adapun biaya yang dibayarkan oleh siswa peserta PKL adalah minimal sebesar Rp.400.000 selama 2 (dua) bulan pelaksanaan PKL di rumah sakit.

Implementasi Pergub No. 58 Tahun 2013 tersebut berkontradiksi dengan Permendikbud No. 50 Tahun

2020 tentang PKL bahwa Dunia kerja memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada peserta PKL sesuai peraturan dan perundang-undangan. Perusahaan/ industri dapat mengeluarkan insentif berupa: transportasi & akomodasi, konsumsi, uang saku, fasilitas dan insentif lainnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Sehingga perlu dilakukan perbandingan analisa manfaat atau *Cost Benefit Analysis* (CBA) yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia analisis manfaat-biaya (AMB). Analisis manfaat biaya memberikan kerangka kerja untuk mengeksplorasi berbagai isu, tujuan utamanya adalah memperkirakan sejauh mana manfaat agregat suatu kebijakan melebihi biayanya, sering kali membandingkan alternatif untuk mengidentifikasi opsi mana (jika ada) yang paling mungkin memberikan manfaat. efisien secara ekonomi. Analisis manfaat-biaya jarang menjadi satu-satunya penentu keputusan kebijakan mengingat beberapa dampak tidak dapat diukur, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan peduli terhadap kesetaraan serta efisiensi, dan pilihan kebijakan sering

kali dibatasi oleh undang-undang dan faktor lainnya (Demas, 2020)

Manfaat yang didapatkan bagi peserta PKL setelah mengikuti kegiatan PKL dengan biaya senilai Rp. 400.000 adalah 1) kegiatan lebih fokus pada pencapaian target kompetensi, 2) berhadapan dengan kasus dan pengalaman nyata di lapangan yang lebih banyak dan terjadwal, 3) tidak ada kegiatan lain selain kegiatan tersebut berorientasi pada pencapaian target kompetensi 4) sertifikat PKL dari dunia kerja yang bermanfaat syarat pendukung kesiapan kerja pasca lulus sekolah, 5) hubungan kemitraan dengan dunia kerja kesehatan yang lebih luas. Sehingga perbandingan biaya yang dibayarkan oleh peserta PKL senilai Rp.400.000,- dengan sejumlah manfaat yang didapatkan, peserta PKL memiliki nilai manfaat yang lebih banyak. Sebagaimana mana teori CBA bahwa analisis manfaat biaya harus dibuat sekomprensif mungkin, tidak hanya perhitungan pengeluaran uang, namun juga apa yang disebut oleh para ekonom sebagai 'biaya peluang' (*opportunity cost*). Ketika sumber daya divestasikan dengan cara tertentu, sumber daya tersebut tidak divestasikan dengan cara lain,

namun menginvestasikannya secara berbeda mungkin juga akan menghasilkan manfaat (Hardiansyah, 2022).

Kendala kedua adalah pada waktu pelaksanaan program. Waktu pelaksanaan program PKL yang dibagi dalam tiga gelombang dalam satu tahun, sehingga peserta PKL pada gelombang pertama bertepatan dengan masa pembelajaran semester genap kelas XI selama 4 bulan dan memiliki masa 2 bulan tersisa untuk belajar reguler di kelas untuk semester genap tersebut. Bagi peserta PKL di gelombang kedua waktu pelaksanaannya setelah mengikuti kegiatan belajar di kelas selama 4 bulan dari jatah 6 bulan kegiatan belajar mengajar (KBM) termasuk pelaksanaan ujian semester. Sehingga harus mempercepat penyelesaian KBM di waktu tersebut agar bisa mengikuti program PKL sesuai jadwal, sedangkan gelombang ketiga dilaksanakan bertepatan pada awal semester ganjil kelas XII yang juga harus diselesaikan selama 4 bulan dan menyisakan waktu belajar di kelas selama hanya 2 bulan di kelas. Kondisi tersebut membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas menjadi kurang efektif dan fokus.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada program PKL di SMK Kesehatan Airlangga, dapat disimpulkan bahwa perencanaan PKL telah mencapai tingkat keberhasilan 100%. Ini terbukti dari pemetaan target kompetensi, penetapan lokasi dan waktu PKL, serta penempatan pembimbing dan pembekalan yang terlaksana sesuai. Pengorganisasian program PKL juga mencapai tingkat keberhasilan yang sama, dengan semua posisi seperti penanggung jawab dan ketua panitia telah ditetapkan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan PKL di SMK Kesehatan Airlangga memperlihatkan fokus pada distribusi siswa pada mitra PKL yang relevan, kegiatan orientasi, dan pementoran oleh instruktur mitra dunia kerja. Meskipun demikian, persentase aspek pelaksanaan program PKL mencapai 92%, menunjukkan masih ada ruang untuk peningkatan. Sedangkan dalam hal monitoring, aspek kesesuaian penempatan PKL dengan kompetensi dan kegiatan praktik di lapangan telah mencapai tingkat keterlaksanaan 100%. Evaluasi program PKL di SMK Kesehatan Airlangga dilakukan melalui

kegiatan sidang PKL, yang mencakup berbagai aspek penting seperti ketercapaian kompetensi dan monitoring oleh pembimbing, mencapai tingkat keterlaksanaan 100%. Namun, terdapat perbedaan dalam kriteria penilaian antara panitia lapangan dan buku pedoman PKL siswa, menyebabkan keterlaksanaan aspek penilaian hanya mencapai 67%.

DAFTAR PUSTAKA

- Amon, L., & Bustami, M. R. (2021). Implementation of School-Based Management in Curriculum and Learning Processes: a Literatur Review. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)*, 1–11.
- Amon, L., & Harliansyah, H. (2022). Analisis Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(1), 147–162. <https://doie.org/10.1018/IJMRE.2021644052>
- Arar, K., & Nasra, M. A. (2020). Linking school-based management and school effectiveness: The influence of self-based management, motivation and effectiveness in the Arab education system in Israel. *Educational Management Administration & Leadership*, 48(1), 186–204.
- Demas, A. (2020). School-based management: Theory and empirical evidence. In *Community Participation with Schools in Developing Countries* (hal. 26–43). Routledge.
- Guha, P. (2021). Are disadvantaged schools slow to adopt school-based management reforms? Evidence from India. *Policy Design and Practice*, 4(4), 517–533.
- Hanim, Z. (2022). Principal Managerial Competence in Realizing Excellent and Quality Vocational High Schools at East Borneo. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 2(4), 517–525.
- Hardiansyah, F. (2022). The Implementation of School-Based Management in Improving Quality of Education in Primary School. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 148–162.
- Haryani, A., & Sunarto, S. (2021). Manajemen dan Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan di SMK Negeri 2 Kebumen. *Media Manajemen Pendidikan*, 3(3), 438–447.
- Mahiroh, I. M., & Abidin, M. (2023). Kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 3230–3245.
- Miles, & Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

- Mulawarman, W. G., Heriman, H., & Pratama, P. A. (2022). Effectiveness of School Management through Strengthening the Managerial Ability of School Principals in the Field of Education Financing. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 2(4), 465–471.
- Mulyasa, E. (2019). *Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Musundire, A., & Dreyer, J. M. (2019). Effectiveness of the Clinical Supervision Strategy as a Tool for Improving Teaching Quality: Perceptions of South African School-Based Managers and Educators. *Africa Education Review*, 16(2), 109–125. <https://doi.org/10.1080/18146627.2018.1454841>
- Nurlaili, N. (2023). Measuring the Competitive-High Quality Graders of Vocational School with Leadership Style: A Case Study in Samarinda. *Journal of Social Studies Education Research*, 14(2), 142–167.
- Radhiah, R., & Sunarto, S. (2021). Pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite Kompetensi Guru Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah SMK DI Kecamatan Karangmojo. *Media Manajemen Pendidikan*, 4(2), 238–247.
- Undang-Undang RI. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Usman, H. (2021). *Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Warman, W., Nurlaili, N., Lorensius, L., Sanda, Y., Sutriyanto, A., Kristianus, K., Sukur, P., Rejeki, S., Nurlaelah, N., & Fatcholis, F. (2022). *Perilaku Organisasi di Bidang Pendidikan*. Jejak Pustaka.